

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK MEWUJUDKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Kasus Di Desa Landung Sari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH

ANGELA MENSIANA GEDHE

2017210021

KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI ADMNISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2021

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK MEWUJUDKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA
LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

Ringkasan

Partisipasi Masyarakat pada pengelolaan ADD merupakan bermacam cara aktivitas yang dicoba secara sendiri maupun perorangan serta ialah sesuatu cara aktivitas yang dicoba secara bersamaan bagi segala anggota warga pada pembangunan desa. Tujuan Riset ini ialah guna mengenali Partisipasi Masyarakat pada pengelolaan ADD guna mewujudkan keberhasilan pembangunan desa serta guna mengenali penyebab penghambat serta pendukung partisipasi warga dalam pengelolaan ADD. Pada Riset ini memakai tata cara kualitatif . fokus Riset ini yakni Partisipasi warga pada pengelolaan ADD guna mewujudkan keberhasilan pembangunan desa; 1. Partisipasi warga pada perencanaan, 2. Partisipasi warga pada penerapan, 3. Partisipasi warga pada pertanggungjawaban serta penyebab penghambat dan pendukung partisipasi warga pada pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil Riset menunjukkan bahwa warga Desa LandungSari sangat berpartisipasi pada pengelolaan ADD. Bukan Cuma pada perencanaan, penerapan serta pertanggungjawaban namun yang sangat berarti yakni pemahaman warga buat ikut serta pada pembangunan desa ialah pemecahan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan desa serta pembangunan akan berjalan sesuai kemauan masyarakat sendiri.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat,ADD,Pembangunan desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Disaat ini pemerintah pusat lagi aktif fokus pada melakukan pembangunan di wilayah khususnya di desa. Perihal ini ditekankan pada Nawacita, dalam jadwal prioritas ke-3 yang berbunyi “ Pembangunan indonesia dari marginal dan menguatkan wilayah serta desa pada konteks negara kesatuan ”. Salah satu tindak lanjutnya atau upaya yang dilakukan yakni dengan membentuk kementerian yang khusus mengelola desa yakni departemen desa, pembangunan wilayah terbelakang serta alih tempat. Prioritas tersebut sangat tepat karena pemerintah desa mempunyai fungsi yang berarti pada perihal pembangunan, mengingat selaku penyelenggara pembangunan atau ujung tombak yang kontan berhubungan bersama warga serta pula jadi faktor penting yang jelas hanya untuk diukur kemampuannya pada perolehan penerapan pembangunan.

Bentuk atau struktur pembangunan yang saat ini di kembangkan ialah Pembangunan Partisipatif. Pembangunan Partisipatif ialah struktur pembangunan yang sudah konvensional dilakukan sama negara ini antara lain kedaulatan, serta kebanyakan warga desa telah menciptakan perihal tersebut menjadi tradisi, semacam dalam melakukan kegiatan kerja bakti, gotong royong dan saling berpartisipasi. Tetapi bentuk yang diwujudkan masa ini ialah perbaikan pada cara tadinya dan makin terstruktur, terarah serta terancang.

Pengertian desa bagi Undang-Undang Nomor 6 Ta 2014 tentang Desa menyatakan kalau desa yaitu keutuhan warga yang memiliki batasan daerah yang

berkuasa dalam mengendalikan serta menangani kegiatan pemerintahan, keinginan warga sekitar bersumber gagasan warga, kewenangan riwayat, serta/ataupun kewenangan konservatif yang diakui serta dihormati pada peraturan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa ialah wilayah yang mempunyai hak otonom guna mengurus serta memajukan pembangunannya sendiri, guna tingkatkan kesejahteraan warga. Sejalan dengan kemajuan independensi wilayah, pemerintah pusat yang menyerahkan pekerjaan pembantuan pada pemerintah desa hendaklah senantiasa memonitor serta menegaskan pembangunan warga desa lewat independensi pemerintahan desa serta kedudukan berperan beserta partisipasi warga pada pembangunan desa. Salah satu langkah pemerintah guna menolong supaya desa menjadi mandiri serta otonom dengan membagikan dana desa.

Guna menunjang eksistensi desa sebagai langkah pemerintah tahap awalnya dengan menyerahkan wewenang kepada desa guna mengatur keuangannya sendiri lewat pembagian Alokasi Dana Desa yang dicoba sama pemerintah wilayah. Tujuannya ialah guna menyerahkan bagian yang makin banyak untuk masyarakat desa supaya mampu berperan aktif saat pengelolaan pembangunan di desa.

Partisipasi warga pada pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah suatu wujud maupun jalan memilih unsur sebagai objek pada Pembangunan Desa. Perihal tersebut seperti disampaikan sama Hasniati, dkk(2017), tentang partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan dana , mengatakan kalau partisipasi warga pada pengelolaan ADD dan metode sebagai objek maupun tokoh pada Pembangunan Desa. Warga berperan serta dalam perancangan yang diucap Musrenbang, implementasi rencana, serta segi peninjauan maupun pengontrolan implementasi rencana alokasi dana desa. Wujud partisipasi bisa berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas maupun perangkat serta

keterampilan maupun kemampuan pada keahlian tersendiri yang dimiliki warga. Partisipasi pada tiap elemen desa dibutuhkan guna menciptakan pembangunan desa yang cocok sama keinginan Pembangunan desa itu sendiri, yang sangat berarti ialah partisipasi pada tiap warga yang menjadi pemegang kewenangan pada negeri ini. Partisipasi warga ialah suatu aspek yang merajai kesuksesan pada strategi pembangunan ataupun peningkatan warga pedesaan.

Berdasarkan peninjauan awal yang dilakukan sama peneliti partisipasi masyarakat sudah cukup baik, akan tetapi tampak sebagian masyarakat yang belum mengetahui seutuhnya mengenai apa itu Alokasi Dana Desa, dan target pada ADD itu sendiri, sebab kurangnya sosialisasi sama Pemerintah Desa. Berkaitan dengan fungsi pengelolaan ADD, Masyarakat desa landungsari benar-benar berperan aktif pada implementasi pembangunan misalnya ikutserta kegiatan Musrebangdesa yang diselenggarakan sama pemerintahan desa landung sari setiap tahun sekali. Pada segi aspek terlihat partisipasinya lewat bentuk ide atau pemikiran, serta terlihat yang partisipasinya lewat bentuk materi. Partisipasi warga sama pengelolaan ADD diperlukan guna menciptakan pembangunan desa yang searah sama keinginan masyarakat atau desa itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas , sehingga penulis terkesan guna melaksanakan Riset sama judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan Desa (Studi Pada Desa LandungSari Kecamatan Dau Kabupaten Malang) ”**.

1.2.Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, sehingga dapat dirumuskan hal-hal seperti berikut :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan ADD guna Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan Desa Di Desa LandungSari Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pula yang jadi tujuan yang hendak dicapai dalam riset ini yaitu :

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa guna mewujudkan keberhasilan pembangunan desa di Desa LandungSari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan ADD

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan bisa berguna bagi berbagai kalangan baik secara akademis ataupun praktis.

1. Secara Akademis

Riset ini diharapkan bisa membagikan wawasan serta mampu memberikan informasi untuk berbagai kelompok terkait partisipasi masyarakat pada Pengelolaan ADD guna mewujudkan keberhasilan pembangunan desa di Desa LandungSari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan akan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa serta guna meningkatkan wawasan di dunia kerja, Penelitian ini menjadi pola implementasi oleh peneliti di dalam mengembangkan pengetahuan yang diterima di kampus secara spesifik saat mengamati beraneka ragam fenomena-fenomena sosial yang timbul di masyarakat serta dapat dijadikan referensi materi ilmu baru maupun pembandingan penelitian berikutnya.

b. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan oleh masyarakat saat mengukur unjuk kerja kepemimpinan yang bisa memenuhi seluruh ketentuan dan kehendak warga Desa LandungSari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya dan Sumantri, 2016. *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek*
)Bandung: Pustaka Setia.

Cohen and Uphoff.1997. *Feasibility and Aplication Of Rural Development Participate.*
Corner University: Ithaca.

Conyers.1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar.* Yogyakarta Gadjah
Mada University Press.

HAW Widja.2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Ali Bulat dan Utuh.* Jakarta:PT
Raja Grafindo Persada.

Haeruman.1997. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan.*
Bappenas.

Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuntitatif, kualitatif, dan R & D.* Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa